

Bab I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bersamaan dengan besarnya pengaruh dari era globalisasi yang sudah memasuki keberagam sektor serta lajunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sudah sulit untuk dibendung lagi, hal tersebut perlu diseimbangkan dengan perkembangan infrastruktur dan teknologi untuk diterapkan pada organisasi/perusahaan agar tercapai visi dan misi yang menjadi tujuan awal dengan metode yang efektif dan efisien. Dampak dari era globalisasi khususnya sektor teknologi informasi dan komunikasi, tentu tidak hanya dirasakan di bagian - bagian tertentu melainkan dari sektor pemerintahan juga tidak dapat dihindari. Pemerintahan perlu juga menerapkan peningkatan terhadap kondisi saat ini yang sedang berjalan agar keselarasan dan integrasi antara proses bisnis dan teknologi yang diterapkan dapat meningkatkan kualitas kerja dari aspek internal organisasi/perusahaan dan juga aspek eksternal demi terciptanya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan selalu terjaga serta dapat ditingkatkan.

Hal tersebut dilihat pula dengan dukungan dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berbunyi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang secara umum pelaksanaannya di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada prinsipnya inovasi SPBE ialah upaya peningkatan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan berbasis *online* dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kalimat *online* disini ialah SPBE yang mengangkat konsep sistem yang terintegrasi dan diharapkan dapat mengurangi panjangnya proses birokrasi terkait informasi, komunikasi dan statistik yang pada kondisi awalnya harus dilakukan dengan cara on-site. Selain itu, melalui sistem SPBE, masyarakat diharapkan dapat ikut serta mengawasi pekerjaan pemerintah. SPBE ini tidak hanya berdampak pada pemerintah, tetapi juga bagi

masyarakat itu sendiri. Sistem SPBE dapat mendukung kinerja atau operasional pemerintah khususnya dalam pertukaran data dan informasi di bidang *government to business, government to citizen, government to government, dan juga government to employees*

Pada Kabupaten Bandung Barat dengan total jumlah penduduk sejumlah 1,714 juta (2018) data tersebut dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, Tentu dengan jumlah penduduk yang telah mencapai lebih dari 1 juta jiwa memngharuskan Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, namun begitu penerapan SPBE di Kabupaten Bandung Barat masih belum matang seperti yang tergambar pada Tabel I-1, sehingga masih butuh pendalaman masalah dan penetapan tujuan pembuatan sistem.

Tabel I-1 Predikat Indeks SPBE (MENPAN-RB, 2018)

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Keterangan Gambar:

Nilai Indeks
Kabupaten Bandung
Barat (2,43)

Acuan tingkat kematangan diatas adalah Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE. Suatu Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah dikatakan memiliki SPBE yang baik jika telah memenuhi 3 (tiga) domain (kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE) , pada Pemerintah

Kabupaten Bandung Barat berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) indeks SPBE di Kabupaten Bandung Barat hanya sebesar 2,43, yang berarti hanya mendapat predikat cukup berdasarkan tabel I-1.

**Tabel I-2 Indeks Domain Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat
(MENPAN-RB, 2018)**

Indeks Domain Tata Kelola	2.14
Proses Bisnis	3.00
Rencana Induk	3.00
Tim Pengarah	2.00
Anggaran	2.00
Pusat Data	2.00
Integrasi Aplikasi	2.00
Aplikasi Umum	1.00

Pada table di atas dapat disimpulkan bahwa aspek pelayanan publik yang ada dipemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) masih belum matang. Baik pada aspek Proses Bisnis, Rencana Induk, Tim Pengarah, Anggaran, Pusat Data, Integrasi Aplikasi, dan Aplikasi Umum. Hal ini bukanlah masalah baru dari dahulu hingga sekarang masalah yang paling utama ialah masalah integrasi sistem dan data antar masing-masing fungsi dalam suatu dinas di pemerintahan. Sebagai Dinas yang kegiatan utamanya memiliki lingkup kerja dalam. Komunikasi, Informasi dan Statistik khususnya pada Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik tentu Diskominfotik membutuhkan banyak integrasi data dari beberapa pihak baik eksternal (non-pemerintahan) maupun internal (badan pemerintahan). Hal ini tidak

dapat terpenuhi secara optimal disebabkan dalam SPBE belum terdapat antar keterkaitan di seluruh fungsi dari segi bisnis, data ataupun teknologinya. Dikutip dari pernyataan Timi Sampurna Irawan adapun permasalahan di fungsi Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik dalam menjalankan kegiatan operasional baik dari fungsi Informasi dan Komunikasi publik, dan Statistik masih ada dilakukan secara manual juga dalam melakukan pengintegrasian data masih melalui proses manual, adapun aplikasi bawaan dari Diskominfo KBB pada fungsi Informasi dan Komunikasi Publik belumlah digunakan secara maksimal.

Maka dari itu dalam penelitian ini akan diusulkan solusi untuk permasalahan yang ada dalam implementasi SPBE ini adalah digunakannya *Enterprise Architecture* (EA) dengan kerangka kerja TOGAF ADM. *Enterprise architecture* merupakan pernyataan bagaimana sebuah organisasi memulai dan menghasilkan susunan yang baik tentang implementasi TI dan proses bisnis dalam organisasi untuk meningkatkan persaingan Ross, Weill, & Robertson, (2006). *Enterprise architecture* merupakan kegiatan pengorganisasian data yang dihasilkan oleh organisasi yang kemudian dipergunakan untuk mencapai tujuan proses bisnis dari organisasi tersebut (Mutyarini & Sembiring, 2006).

Pemilihan *framework* TOGAF karena *framework* ini berfokus pada siklus implementasi (ADM) dan proses perancangan yang detail dibanding *framework* lain. TOGAF merupakan *framework* EA yang cocok digunakan oleh *enterprise* yang masih belum terdapat EA dan keperluan untuk pengembangan *enterprise architecture*. TOGAF ADM menyatakan visi dan prinsip yang jelas tentang bagaimana melakukan pengembangan *enterprise architecture*, prinsip tersebut digunakan sebagai ukuran dalam menilai keberhasilan dari pengembangan arsitektur *enterprise* oleh organisasi (The Open Group, 2011).

Penelitian tugas akhir ini berfokus dalam perancangan *enterprise architecture* Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dari *preliminary phase, architecture vision, business architecture, information system architecture, technology architecture, opportunities and solutions migration planning*. Pada pembahasan latar belakang penelitian ini, sudah dapat dijelaskan bagaimana

pentingnya enterprise architecture pada Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang akan menjadi landasan dalam menyusun semua kegiatan pada perusahaan agar lebih efektif dan efisien.

I.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana rancangan integrasi dan standarisasi proses bisnis yang sesuai dengan tujuan serta kebutuhan bisnis Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana rancangan arsitektur data yang sesuai dengan kebijakan satu data nasional dan rancangan sistem pemulihan bencana pada Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana rancangan integrasi aplikasi dengan pendekatan arsitektur berorientasi layanan yang memungkinkan komunikasi antara Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat?
4. Bagaimana rancangan *Enterprise Architecture* SPBE Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat yang dapat memenuhi kebutuhan integrasi proses bisnis, optimalisasi aplikasi berbagi pakai, integrasi aplikasi *existing* dan target, serta sentralisasi dan keamanan data yang sesuai standar SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018?
5. Bagaimana rancangan cetak biru dan peta jalan teknologi informasi (TI) sebagai acuan dalam implementasi sarana SPBE pada Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat yang sesuai standar SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Merancang rancangan *Enterprise Architecture* SPBE menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM, dimulai dari fase pengembangan Preliminary Phase hingga Migration Planning dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan organisasi dari 4 (empat) domain utama yaitu bisnis, data, aplikasi dan teknologi yang bertujuan untuk memastikan integrasi dan mendefinisikan standar operasional proses bisnis Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat.
2. Merancang arsitektur data dengan pertimbangan pemusatan penyimpanan data untuk menyimpan master data secara terpusat sebagai bentuk implementasi kebijakan satu data nasional dan antisipasi redundansi.
3. Memetakan integrasi aplikasi yang digunakan Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat memanfaatkan Government Service Bus (GSB) dengan pendekatan arsitektur berorientasi layanan sehingga memungkinkan komunikasi diantaranya.
4. Merancang dan menghasilkan cetak biru implementasi SPBE sesuai dengan kebutuhan Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat seperti integrasi proses bisnis, optimalisasi aplikasi berbagi pakai, integrasi aplikasi *existing* dan target, serta sentralisasi dan keamanan data mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018.
5. Menghasilkan rancangan cetak biru dan peta jalan TI sebagai acuan pengembangan teknologi terintegrasi dalam implementasi SPBE di Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat selama beberapa periode kerja kedepan.

I.4 Batasan Penelitian

Adapun yang menjadi batasan masalah dari hasil permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Perancangan *Enterprise Architecture* hanya berfokus pada merancang, tidak sampai dengan implementasi.
2. Menggunakan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 sebagai acuan standar dalam perancangan EA SPBE di Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat.
3. Fokus penelitian yang digunakan adalah terletak pada Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat.
4. Penelitian ini dilakukan dari fase-fase TOGAF ADM yaitu *preliminary phase, architecture vision, business architecture, application architecture, technology architecture, opportunities and solutions, dan migration planning*.

I.5 Manfaat Penelitian

1. Mengusulkan rancangan integrasi dan standarisasi proses bisnis terhadap Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat.
2. Menggambarkan efektifitas dan efisiensi proses yang dapat diperoleh Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat, jika mengimplementasikan rancangan EA SPBE dalam kegiatan operasionalnya.
3. Memberikan rancangan *Enterprise Architecture* SPBE di Informasi dan Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat diharapkan integrasi proses bisnis, aplikasi serta sentralisasi data dan keamanan menjadi dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan operasionalnya
4. Memiliki standar komponen IT yang dibutuhkan dalam implementasi SPBE pada suatu instansi pemerintah.

I.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai alasan penelitian ini dilakukan beserta permasalahan-permasalahan yang terjadi hingga solusi dari permasalahan yang ada pada Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik dan Fungsi Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai pembahasan pengerjaan tugas akhir yang diselaraskan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan tugas akhir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai model konseptual dan sistematika pemecahan masalah dari penyusunan tugas akhir ini.

BAB IV PERSIAPAN DAN IDENTIFIKASI

Pada bab persiapan dan identifikasi data terdiri dari dua fase, yaitu fase persiapan dan fase identifikasi. Fase persiapan menjelaskan tentang kebutuhan data dan teknik pengumpulan data. Fase identifikasi menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, gambaran umum organisasi, visi misi organisasi, struktur organisasi, identifikasi bisnis, identifikasi data, identifikasi aplikasi, dan identifikasi teknologi.

BAB V ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis *Enterprise Architecture* fungsi perencanaan pembangunan existing dan perancangan untuk arsitektur target pada Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik dan Fungsi Statistik Diskominfo Kabupaten Bandung Barat.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan saran yang diberikan untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya.